

LAPORAN KEUANGAN BP3TKI BANDUNG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40275
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3tkibdg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2020

Pt. Kepala BP3TKI Bandung,



Tugiyarto, S.Sos.

NIP. 19671209 198602 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	35
VI. Lampiran dan Daftar	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2020

Pt. Kepala BP3TKI Bandung,



Tugiwarto, S.Sos.

NIP. 19671209 198602 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70.626.600 atau mencapai 0,00 persen karena BP3TKI Bandung tidak mengestimasikan Anggaran Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.441.786.163 atau mencapai 98.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.646.963.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.163.413.163 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.839.904.902; Aset Tetap (netto) sebesar Rp12.202.005.457.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp168.032.890 dan Rp13.995.380.273.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15.014.362.551 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp82.085.547. Sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp14.932.277.004.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp14.257.637.965 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp14.932.277.004 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.381.868.563 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp13.995.380.273.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN TA 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Anggaran	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	70.626.600	0,00	60.657.325
JUMLAH PENDAPATAN		-	70.626.600	0,00	60.657.325
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.506.895.000	4.493.177.820	99,70	4.336.086.774
Belanja Barang	B.4	10.122.568.000	9.931.225.568	98,11	14.038.130.321
Belanja Modal	B.5	17.500.000	17.382.775	99,33	349.086.800
JUMLAH BELANJA		14.646.963.000	14.441.786.163	98,60	18.723.303.895

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3TKI BANDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1	87.131.200	12.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.2	(435.656)	(60.000)
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		86.895.544	11.940.000
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.3	1.753.209.358	1.786.586.433
Persediaan			
JUMLAH ASET LANCAR		1.839.904.902	1.798.526.433
ASET TETAP			
Tanah	C.4	8.573.442.000	8.573.442.000
Peralatan dan Mesin	C.5	6.215.386.041	6.354.424.266
Gedung dan Bangunan	C.6	3.304.281.000	3.005.458.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	13.500.000	13.500.000
Akumulasi Penyusutan	C.8	(5.904.603.584)	(5.494.451.969)
JUMLAH ASET TETAP		12.202.005.457	12.452.372.297
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TuntuTan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	34.953.572	100.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.10	(174.768)	(500.000)
<i>Tuntutan Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>		34.778.804	99.500.000
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		34.778.804	99.500.000
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.11	394.764.700	394.764.700
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(308.040.700)	(305.664.700)
JUMLAH ASET TETAP		86.724.000	89.100.000
JUMLAH ASET		14.163.413.163	14.439.498.730
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	168.032.890	181.860.765
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		168.032.890	181.860.765
JUMLAH KEWAJIBAN		168.032.890	181.860.765
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	13.995.380.273	14.257.637.965
JUMLAH EKUITAS		13.995.380.273	14.257.637.965
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.163.413.163	14.439.498.730

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	4.945.353
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		-	4.945.353
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	4.945.353
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	4.490.762.444	4.379.502.757
Beban Persediaan	D.3	271.281.750	565.286.232
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.994.334.475	8.866.801.397
Beban Pemeliharaan	D.5	478.433.195	369.991.369
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.210.514.899	4.464.365.380
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	568.985.364	732.776.891
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	50.424	560.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		15.014.362.551	19.379.284.026
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(15.014.362.551)	(19.374.338.673)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	2.250.000
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	2.250.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	85.421.972	275.326.472
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	3.336.425	320.500
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non - Operasional Lainnya		82.085.547	277.255.972
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(14.932.277.004)	(19.097.082.701)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(14.932.277.004)	(19.097.082.701)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
EKUITAS AWAL	E.1	14.257.637.965	14.676.729.096
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.932.277.004)	(19.097.082.701)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	E.3.1	-	-
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
Selisi Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	298.823.000	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3	(10.672.251)	-
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	-	-
JUMLAH		288.150.749	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.381.868.563	18.677.991.570
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(262.257.692)	(419.091.131)
EKUITAS AKHIR	E.6	13.995.380.273	14.257.637.965

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3TKI Bandung

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984, Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep- 137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amanat UU No. 39 Thun 2004 pasal 94 dan 98, maka Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BP3TKI Bandung berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang Berkualitas dan Bermartabat di wilayah Provinsi Jawa Barat”***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penempatan TKI;
- Pendedayagunaan Pegawai BP3TKI secara optimal;
- Meningkatkan sosialisasi penempatan TKI;
- Meningkatkan verifikasi administrasi secara ketat;
- Meningkatkan perlindungan dan advokasi CTKI/TKI;
- Meningkatkan penyiapan dan pemberangkatan CTKI.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BP3TKI Bandung. Laporan

Kuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3TKI Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3TKI Bandung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3TKI Bandung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan secara khusus direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BP3TKI Bandung dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan	25

Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama untuk periode periode berjalan, BP3TKI Bandung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang tidak merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2019 BP3TKI Bandung. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	4.247.916.000	4.506.895.000
Belanja Barang	9.713.436.000	10.122.568.000
Belanja Modal	17.500.000	17.500.000
Jumlah Belanja	13.978.852.000	14.646.963.000

Realisasi
Pendapatan
Rp70.626.600

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp70.626.600 atau mencapai 0,00 persen, tidak ada estimasi pendapatan yang di tetapkan pada BP3TKI Bandung. Pendapatan BP3TKI Bandung berasal dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	66.177.600	-
Pendapatan Lain-lain	-	4.449.000	-
Jumlah	-	70.626.600	-

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	NTB	NTPN	Jumlah
1	190416266960	D449934G6OHA2L82	5.000.000
2	000000593635	424034GE8MJLOUP9	580.000
3	000000596349	7C7814GEJF6H8RP9	50.000.000
4	000000599056	EAC824GEVMBGFLP9	660.000
5	000000601831	BF1E44GFBK6EUMP9	259.000
6	190425579483	3EAF56UFLP6PFS4I	2.530.000
7	190425579539	0D8496UGBTOHV84I	300.000
8	000000086420	453524558GNS6UTP	120.000
9	190509119335	519DF5DPOSL8GEI	1.000.000
10	190709520045	E03CC242KQDVV9II	1.000.000
11	190808086521	11AA33CIE5U1Q3CQ	1.000.000
12	190610289130	86BEE3E1HPF25OP2	1.000.000
13	190909636033	A4D662G4UBEIG5JS	1.000.000
14	000000487436	46FEB1JNEGSFJQ0B	3.177.600
15	191009335393	035312G4UBHK08P1	1.000.000
16	191108118916	635F53CIE66TR5K7	1.000.000
17	191209985829	2DBD455DDRELSSMB	1.000.000
Jumlah			70.626.600

a. Pendapatan Penerimaan PNBPN yaitu terdiri :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	63.000.000
2.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	3.177.600
Jumlah		66.177.600

b. Pendapatan Lain-lain yaitu terdiri :

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	259.000
2.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	4.190.000
Jumlah		4.449.000

Realisasi Pendapatan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 16,44 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan adanya setoran Tuntutan Gati Rugi (TGR) atas nama Ismail Usman di Semester II Tahun Anggaran 2019 dan adanya pengembalian belanja barang TAYL serta belanja pegawai TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2019 dan TA. 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2019	REALISASI TA. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	66.177.600	19.195.353	244,76
Pendapatan Lain-lain	4.449.000	41.461.972	(89,27)
Jumlah	70.626.600	60.657.325	16,44

Realisasi Belanja
Negara
Rp14.441.786.163

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 2019 adalah sebesar Rp14.441.786.163 atau 98,60 persen dari anggaran belanja sebesar Rp14.646.963.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.506.895.000	4.493.177.820	99,70%
Belanja Barang	10.122.568.000	9.931.225.568	98,11%
Belanja Modal	17.500.000	17.382.775	99,33%
Total Belanja Kotor	14.646.963.000	14.441.786.163	98,60%
Pengembalian Belanja	-	12.133.480	-100,00%
Jumlah	14.646.963.000	14.453.919.643	98,68%

Dibandingkan dengan TA. 2018, Realisasi Belanja TA. 2019 mengalami penurunan sebesar 22,87 persen. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan pangkat, pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan yang berasal dari penambahan pegawai sebanyak 1 (satu) CPNS di Tahun 2019;
2. Tidak ada lagi kegiatan tambahan operasional unit pos layanan di Kab./Kota di Jawa Barat dan tidak adanya kegiatan TKI Purna;
3. Berkurangnya belanja modal untuk sarana dan prasarana LTSP dan layanan kantor BP3TKI Bandung.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk TA. 2019 dan TA. 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2019	REALISASI TA. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.493.177.820	4.336.086.774	3,62
Belanja Barang	9.931.225.568	14.038.130.321	(29,26)
Belanja Modal	17.382.775	349.086.800	(95,02)
Jumlah	14.441.786.163	18.723.303.895	(22,87)

*Belanja Pegawai
Rp4.493.177.820*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2019 dan TA. 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.493.177.820 dan Rp4.336.086.774. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,62 persen dari TA. 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat, pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan sebanyak 1 CPNS di BP3TKI Bandung dalam rangka mendukung program maupun kegiatan.
2. Adanya pembayaran Tukin THR dan Tukin ketigabelas pada tahun 2019;
3. Adanya pengangkatan 12 CPNS menjadi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2019 dan TA. 2018

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2019	REALISASI PER 31 DES 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.196.093.056	2.124.893.193	3,35
Belanja Uang Makan PNS	312.175.000	243.901.000	27,99
Uang Lembur PNS	80.239.000	90.538.000	(11,38)
Tunjangan Kinerja PNS	1.909.826.383	1.881.375.804	1,51
Jumlah Belanja Kotor	4.498.333.439	4.340.707.997	3,63
Pengembalian Belanja Pegawai	(5.155.619)	(4.621.223)	11,56
Jumlah Belanja	4.493.177.820	4.336.086.774	3,62

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp9.931.225.568*

Realisasi Belanja Barang TA. 2019 dan TA. 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.931.225.568 dan Rp14.038.130.321. Realisasi Belanja Barang TA. 2019 mengalami penurunan 29,30 persen dari Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan tidak ada lagi kegiatan tahun lalu yang berupa kegiatan TKI Purna sehingga belanja jasa dan biaya perjalanan dinas yang turun cukup signifikan.

Perbandingan Belanja Barang TA. 2019 dan TA. 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2019	REALISASI TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.911.094.365	2.960.414.285	(1,67)
Belanja Barang Non Operasional	1.631.748.605	2.478.732.140	(34,17)
Belanja Jasa	2.463.159.004	3.353.837.891	(26,56)
Belanja Pemeliharaan	482.858.257	369.991.369	30,51
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.212.560.698	4.471.622.580	(50,52)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	236.782.500	423.101.256	(44,04)
Jumlah Belanja Kotor	9.938.203.429	14.057.699.521	(29,30)
Pengembalian Belanja	(6.977.861)	(19.569.200)	(64,34)
Jumlah Belanja	9.931.225.568	14.038.130.321	(29,26)

*Belanja Modal
Rp17.382.775*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2019 dan TA. 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.382.775 dan Rp349.086.800. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA. 2019 mengalami penurunan sebesar 92,73 persen dibandingkan TA. 2018, disebabkan BP3TKI Bandung hanya mengajukan anggaran belanja modal berupa alat kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2019 dan TA. 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALIASI TA. 2019	REALIASI TA. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.382.775	239.086.800	-92,73
Jumlah Belanja Kotor	17.382.775	239.086.800	-92,73
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	17.382.775	239.086.800	-92,73

*Belanja Modal
Rp17.382.775*

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2019 adalah sebesar Rp17.382.775, mengalami penurunan sebesar 95,02 persen dibandingkan dengan TA. 2018 sebesar Rp249.086.800. Hal ini disebabkan BP3TKI Bandung hanya mengajukan belanja modal yang berupa pembelian peralatan dan mesin operasional sarana dan prasarana BP3TKI Bandung.

Perbanding Realisasi Belanja Modal TA. 2019 dan TA. 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Alat kantor		87.045.800	-100,00
Alat rumah tangga	3.382.775	131.031.000	-97,42
Alat studio	14.000.000	0	0,00
Alat komunikasi	0	7.800.000	-100,00
Komputer Unit	0	103.200.000	-100,00
Perangkat Komputer	0	20.010.000	-100,00
Jumlah Belanja	17.382.775	349.086.800	-95,02

Bagian Lancar Tagihan
TP/ TGR (Netto)
Rp87.131.200

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp87.131.200 dan Rp12.000.000 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

No	Nama	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Sdr. Ismail Usman	49.000.000	12.000.000
2	CV. Nugraha Pratama	38.131.200	-
Jumlah		87.131.200	12.000.000

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp(435.656)

C.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(435.656) dan (Rp60.000).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisih	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	87.131.200	0,50%	435.656
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	87.131.200		435.656

Persediaan
Rp2.1753.209.358

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.753.209.358 dan Rp1.786.586.433.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
Barang Konsumsi	1.753.209.358	1.786.586.433
Jumlah	1.753.209.358	1.786.586.433

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp8.573.442.000

C.4 Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor BP3TKI Bandung Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000, tidak ada mutasi tanah pada tahun 2019.

Tanah seluas 943,00 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m ²	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8.573.442.000
Jumlah			8.573.442.000

Peralatan dan Mesin
Rp6.215.386.041

C.5 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp6.215.386.041 dan Rp6.354.424.266. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.354.424.266
Mutasi Tambah:	28.091.775
Pembelian	17.382.775
Transfer masuk	10.709.000
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi Kurang:	167.130.000
Extrakomptable	167.130.000
Reklasifikasi keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	6.215.386.041
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	-5.558.082.776
Nilai Buku per 31 Desember 2019	657.303.265

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

- Mutasi transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 senilai Rp14.000.000

1. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : BA.536/BP3TKI-6/V/2019 Tanggal 20 Mei 2018 senilai Rp14.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Chairman/Audio Conference (Spider BT-2210/UHF-401)	1	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
JUMLAH				Rp 14.000.000

2. Pembelian BP3TKI Bandung sesuai dengan BAST nomor : 2019/LKPP/HCI/IX/077 tanggal 27-09-2019 senilai Rp3.383.755 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	Kursi Besi/Metal (Ursula Managerial Chair)	1	Rp 1.589.500	Rp 1.589.500
1	Kursi Besi/Metal (Ursula Managerial Chair)	1	Rp 1.793.275	Rp 1.793.275
JUMLAH				Rp 3.382.775

- Mutasi transaksi Transfer Masuk peralatan dan mesin Per 30 Juni 2019 senilai Rp2.469.000 :

1. Transfer Masuk dari Puslitfo Satker Sekretariat Utama BAST Nomor : BA.187/SU-PLI/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 senilai Rp2.469.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Router (Wireless AccessPoint UBIQUITIUNIFI Access Point Pro	1	Rp 2.469.000	Rp 2.469.000	BA.31/SU-PAN/II/2019 Tanggal 26-02-2019
JUMLAH				Rp 2.469.000	

2. Transfer Masuk dari Biro Keuangan dan Umum Satker Sekretariat Utama BAST Nomor : BA.478/SU-PAN/XIII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 senilai Rp8.240.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	P.C Unit (Dell Inspiron AIO 3280)	1	Rp 8.240.000	Rp 8.240.000	BA.478/SU-PAN/XII/2019 Tanggal 23-12-2019
JUMLAH				Rp 8.240.000	

Gedung dan Bangunan
Rp3.304.281.000

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp3.304.281.000 dan Rp3.005.458.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	3.005.458.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Selisih Revaluasi Aset tetap	298.823.000
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2019	3.304.281.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2019	(232.015.416)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	3.072.265.584

Mutasi tambah :

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisi Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dan hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Selisih Nilai Revaluasi
1	Gedung BP3TKI Bandung	298.823.000
Jumlah		298.823.000

Aset Tetap Lainnya
Rp13.500.000

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp13.500.000 dan Rp13.500.000. Aset tetap tersebut berupa monografi.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.904.603.584

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp5.904.603.584 dan Rp5.494.451.969. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.573.442.000	0	8.573.442.000
2	Peralatan dan Mesin	6.215.386.041	5.672.588.168	542.797.873
3	Gedung dan Bangunan	3.304.281.000	232.015.416	3.072.265.584
4	Aset Tetap Lainnya	13.500.000	0	13.500.000
Akumulasi Penyusutan		18.106.609.041	5.904.603.584	12.202.005.457

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp34.953.572

C.9 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp34.953.572 dan Rp100.000.000. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan (Penurunan)
CV. Nugraha Pratama	34.953.572	100.000.000	(65,05)
Jumlah	34.953.572	100.000.000	(65,05)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp174.768)

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar (Rp174.768) dan (Rp500.000).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% Penyisih	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	34.953.572	0,50%	174.768
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	34.953.572		174.768

Rangkuman Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut :

Perbandingan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	kenaikan (penurunan)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	174.768	500.000	(65,05)
Jumlah	174.768	500.000	(65,05)

Aset Lain-Lain
Rp394.764.700

C.11 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp394.764.700 dan Rp394.764.700. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional etitas. Tidak terdapat mutasi aset lain- lain.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp308.040.700

C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp308.040.700 dan Rp305.664.700. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Akumulasi penyusutan Barang Milik Negara dari Aset yang dihentikan penggunaan operasional pemerintah.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp168.032.890*

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp168.032.890 dan Rp181.860.765. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor BP3TKI Bandung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pembayaran Belanja Pegawai PNS belum dibayar	128.615.302	Tunjangan Kinerja PNS Desember 2019
Pembayaran Belanja Pegawai PNS belum dibayar	23,944,000	Uang Makan PNS Bulan Desember 2019
Pembayaran Belanja Langanan Lisitrik belum dibayar	8,928,256	Tagihan Listrik Bulan Desember 2019 dibayar Januari 2020
Pembayaran Belanja Langanan Telepon belum dibayar	849,784	Tagihan Telepon bulan Desember 2019 dibayar Januari 2020
Pembayaran Belanja Langanan Air belum dibayar	232,000	Tagihan Air PDAM bulan Desember 2019 dibayar Januari 2020

*Ekuitas
Rp13.900.685.738*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.995.380.273 dan Rp14.257.637.965. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.945.353.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Jasa	0	4.945.353	(100,00)
Jumlah	0	4.945.353	(100,00)

Beban Pegawai
Rp4.490.762.444

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.490.762.444 dan Rp4.379.502.757. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.785.756.780	1.711.187.040	4,36
Beban Pembulatan Gaji PNS	27.263	30.902	(11,78)
Beban Tunjangan-Tunjangan	407.915.694	412.565.151	(1,13)
Beban Uang Makan	312.633.100	267.176.000	17,01
Beban Lembur	77.834.000	90.538.000	(14,03)
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja)	1.906.595.607	1.898.005.664	0,45
Jumlah	4.490.762.444	4.379.502.757	2,54

Beban Persediaan
Rp221.281.750

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp271.281.750 dan Rp565.286.323. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat penggunaan atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 30 September 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	271.281.750	565.286.323	(52,01)
Jumlah	271.281.750	565.286.323	(52,01)

Beban Barang dan
Jasa
Rp6.994.334.475

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.994.334 dan Rp8.866.801.397. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kenaikan jumlah pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja dan langganan air yg signifikan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang & Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.504.953.649	2.560.465.864	(2,17)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.580.716	7.028.421	22,09
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	397.560.000	380.608.000	4,45
Beban Bahan	1.360.373.605	2.225.007.140	(38,86)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	258.650.000	266.450.000	(2,93)
Beban Langganan Listrik	189.301.630	217.332.336	(12,90)
Beban Langganan Telepon	7.917.859	11.696.180	(32,30)
Beban Langganan Air	4.967.100	398.600	1.146,14
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.785.116	67.835.776	4,35
Beban Jasa Sewa	1.247.904.800	1.785.940.280	(30,13)
Beban Jasa Profesi	943.340.000	1.267.880.000	(25,60)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	76.158.800	100,00
Jumlah	6.994.334.475	8.866.801.397	(21,12)

Beban
Pemeliharaan
Rp478.433.193

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 September 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp478.433.193 dan Rp369.991.369. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Bebas Pemeliharaan karena adanya perbaikan/pemeliharaan pada gedung dan bangunan dan peratatan mesin yang segera diperbaiki. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.622.938	140.496.000	36,39
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	286.810.257	229.495.369	24,97
Jumlah	478.433.195	369.991.369	29,31

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.210.514.899

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.210.514.899 dan Rp4.464.365.380. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas karena tidak adanya kegiatan Pemberdayaan TKI Purna. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir 30 September 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	30 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	889.779.964	1.298.130.120	(31,46)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	424.225.000	432.435.000	(1,90)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	72.611.627	163.522.000	(55,60)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	823.898.308	2.570.278.260	(67,95)
Jumlah	2.210.514.899	4.464.365.380	(50,49)

Beban Penyusutan
Dan Amortisasi
Rp568.985.364

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp568.985.364 dan Rp398.972.880. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	452.603.985	658.842.367	(31,30)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.005.379	71.558.524	59,32
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.376.000	2.376.000	0,00
Jumlah Penyusutan	568.985.364	732.776.891	(22,35)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	568.985.364	732.776.891	(22,35)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp50.424

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp50.424 dan Rp560.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	60.000	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih JP - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	50.424	500.000	(89,92)
Jumlah	50.424	560.000	(91,00)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN PENDAPATAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DES 2018	31 DES 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	76.262.372	124.000.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	259.000	32.407.972	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	4.190.000	9.054.000	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	4.710.600	109.864.500	(95,71)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	85.421.972	151.326.472	(43,55)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp14.257.637.965

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.257.637.965 dan Rp14.676.729.096.

Defisit LO

Rp14.738.820.790

E.2 (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp14.738.820.790 dan Rp19.097.082.701. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0*

E.3 Koreksi Yang Manambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan

Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

*Selisi Revaluasi
Aset Tetap
Rp298.823.000*

E.3.2 Selisi Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian ulang/kembali Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp298.823.000 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang/kembali atas Gedung dan Bangunan di BP3TKI Bandung.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp10.672.251*

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp10.672.251 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin			-
Gedung dan Bangunan	298.823.000	288.150.749	10.672.251
Aset Tak Berwujud			-
Jumlah			10.672.251

Transaksi Antar
Entitas
Rp14.381.868.563

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.381.868.563 dan Rp18.677.991.570. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.441.786.163	18.723.303.895
Diterima Dari Entitas Lain	(70.626.600)	(60.657.325)
Transfer Masuk	10.709.000	15.345.000
Jumlah	14.381.868.563	18.677.991.570

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.3.1 Diterima Entitas Lainnya (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas (BUN). Pada periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, DKEL sebesar Rp14.441.786.163 dan Rp18.723.303.895 sedangkan DDEL untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp70.626.600 dan Rp60.657.325.

E.3.2 Transfer Masuk/Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.709.000 dan Rp15.345.000 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai	
			31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Peralatan dan Mesin	Deputi Penempatan BNP2TKI		15.345.000
2	Peralatan dan Mesin	Sekretaris Utama BNP2TKI	10.709.000	
	Jumlah		10.709.000	15.345.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 tidak ada perpindahan Aset maupun Persediaan.

Ekuitas Akhir
Rp13.900.685.738

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.995.380.273 dan Rp14.257.637.965.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada kejadian penting yang tercatat temuan dan tindak lanjutan temuan BPK.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Tidak ada daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah Bank BRI A/C 0005-01-001570-30-5 a.n. Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung.

Surat Pengesahan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung dari KPPN Bandung I sesuai surat Nomor : S-297/WPB.13/KP.0121/2011 tanggal 24 Januari 2011.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP.236/KA/XII/2018 tanggal 26 Desember 2016 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan BNP2TKI Tahun Anggaran 2019. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Barang/Jasa dan Pengelola Barang Milik Negara pada Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung maka pada tanggal 02 Januari 2019 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan. Perubahan Pengelola Keuangan untuk periode yang

berakhir 30 Juni 2019 di BP3TKI sebagai berikut :

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Penandatanganan SPM	Neng Wepi, S.H., M.H	La Ode Askar, S.Pd., M.Si